

## ABSTRACT

### SEMARANG PORT LABOUR ORGANIZATION RIVALRY IN 1947-1965

By:

Lela Fatmawati

lelafatmawati@gmail.com

12407141002

In 1946, Dutch regained control of Semarang, at that moment the trade union organization in the port had opportunity to become active again, due to their need for labour, to restore the port of Semarang after Japanese colonization. In Japanese colonization, the port was losing ground due to the cessation of trading and workers activities. Gabungan Buruh Pelabuhan (GBP) was exist at the port of Semarang which neutral from political influence in 1947, and then in 1948 stood for Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) shaded by SOBSI. Both unions were competing to grab attention of the workers at the port. The purpose of this research is to determine the development of port workers in Semarang during revolution era and rivalry between GBP and SBPP.

This research used methods of critical historical research, which includes four stages; heuristics, criticism of sources, interpretation, and historiography. Heuristics is the stage of the search and collection of data or sources and relevant information. Criticism source is the stage to test the authenticity and credibility of the sources obtained in terms of both physical and browse the source to find the facts of history. Interpretation is the stage for searching for meaning-related linkages between historical facts obtained so that the historical events become more meaningful. Historiography is the stage of writing that conveys the synthesis in the form of historical works.

The results of this research indicate that port workers in Semarang have an important role for the economy in Semarang and as part of the struggle of Indonesian people in maintaining independence during the revolution. Port workers who are members of GBP and SBPP, both of them of course have a goal in their action movements, SBPP shaded by SOBSI certainly have other purpose besides fought for improving the workers fate, they also transmitting the communist influence. As it is known that the propaganda of SBPP aimed into the political sphere containing incitement among the workers against their employers and the government. Another goal of GBP's actions led by Ritonga is seeking the economic benefits for their company. GBP is certainly neutral from the influence of political organizations, but the presence of the workers turns out become a tool for the company.

**Keywords:** *Port Labour Organization, Rivalry, Semarang.*

## ABSTRAK

### PERSAINGAN ORGANISASI BURUH PELABUHAN DI SEMARANG TAHUN 1947-1965

Oleh: Lela Fatmawati  
12407141002

Pada tahun 1946 Belanda kembali menguasai kota Semarang, saat itu juga organisasi serikat buruh di pelabuhan mendapat kesempatan untuk aktif kembali, hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan atas tenaga buruh untuk memulihkan kembali pelabuhan Semarang pasca kependudukan Jepang. Ketika masa pendudukan Jepang pelabuhan mengalami kelumpuhan karena terhentinya kegiatan perdagangan dan terhentinya kegiatan para buruh. Pada tahun 1947 di pelabuhan Semarang berdiri Gabungan Buruh Pelabuhan (GBP) yang netral dari pengaruh politik, kemudian pada tahun 1948 berdirilah Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) yang dinaungi oleh SOBSI. Kedua serikat tersebut berlomba dalam mendapatkan pengaruh para buruh di pelabuhan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan buruh pelabuhan di Semarang pada masa revolusi dan persaingan organisasi buruh pelabuhan antara GBP dan SBPP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis, yang meliputi empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan tahap pencarian dan pengumpulan data atau sumber-sumber dan informasi yang relevan. Kritik sumber merupakan tahap untuk menguji otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh baik dari segi fisik maupun isi sumber guna menemukan fakta sejarah. Interpretasi merupakan tahap untuk mencari keterkaitan makna yang berhubungan antara fakta sejarah yang didapat sehingga peristiwa sejarah menjadi lebih bermakna. Historiografi merupakan tahap penulisan yang menyampaikan sintesis dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa buruh pelabuhan yang ada di Semarang mempunyai peran penting bagi perekonomian di kota Semarang dan sebagai bagian dari perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi. Buruh-buruh pelabuhan yang tergabung dalam SBPP dan GBP tentunya mempunyai tujuan masing-masing dalam tiap aksi gerakannya, SBPP yang dinaungi oleh SOBSI tentunya mempunyai tujuan lain selain memperjuangkan perbaikan nasib dari para buruh yaitu menularkan pengaruh komunisnya. Seperti yang diketahui bahwa propaganda SBPP semakin lama mengarah ke dalam ranah politik yang mengandung penghasutan kalangan buruh terhadap para majikannya dan terhadap pemerintah. Tujuan lain GBP dari aksi-aksi yang dipimpin oleh Ritonga yaitu mencari keuntungan ekonomis untuk perusahaannya sendiri. Secara organisasi GBP memang bersifat netral dari pengaruh organisasi politik, namun keberadaan para buruh ternyata lebih menjadi suatu alat untuk menguntungkan perusahaannya.

**Kata Kunci:** *Organisasi Buruh Pelabuhan, Persaingan, Semarang.*

## A. Pendahuluan

Sebagai kota perdagangan, Semarang tidak lepas dari peran penting pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Sejak jatuhnya Semarang ke *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) tahun 1678 hingga masa kemerdekaan, pelabuhan Semarang selalu menjadi tiang penyangga ekonomi dalam bidang ekspor-impor. Kelemahan fasilitas dermaga yang hanya dapat menampung kapal dengan ukuran maksimum 1300 ton, tidak menjadi masalah bagi pertumbuhan ekonomi Semarang. Keberadaan buruh *tongkang* seakan menjadi jawaban dari kesulitan bongkar muat kapal yang berukuran lebih dari 1.300 ton untuk menuju dermaga.<sup>1</sup>

Kondisi Pelabuhan Semarang yang demikian, membuat kesadaran bahwa keberadaan buruh sangat penting dalam kegiatan bongkar muat. Setelah dikembalikannya kedaulatan Indonesia, sedikit demi sedikit kehidupan rakyat Indonesia semakin

membaik demikian pula untuk kondisi buruh beserta organisasi-organisasinya. Tahun 1950 secara resmi organisasi buruh di Indonesia menjadi anggota Organisasi Perburuhan Internasional atau *International Labour Organization* (ILO). Tahun 1955, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perburuhan No. 90 tentang prosedur pendaftaran serikat buruh. Hal ini yang memudahkan pembentukan serikat buruh untuk tumbuh subur di seluruh Indonesia.<sup>2</sup>

Khusus di Pelabuhan Semarang pada masa Revolusi muncul dua Serikat Buruh yaitu Gabungan Buruh Pelabuhan (GBP) tahun 1947-1953 dan Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) tahun 1948-1965. Dalam perkembangannya organisasi-organisasi ini selalu bersaing untuk mengorganisir buruh di pelabuhan Semarang. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September PKI di Semarang berdampak bagi para buruh,

---

<sup>1</sup> Kursin, "Organisasi Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dalam Upaya Penyelesaian Konflik Perburuhan Tahun 1965-2000", *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm. 2.

---

<sup>2</sup> Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 24.

yaitu dilakukannya pembubaran bagi SBPP.<sup>3</sup>

## **B. Organisasi Buruh di Semarang Pasca Kemerdekaan**

Kota Semarang erat kaitannya dengan Sarekat Islam (SI) yang juga berpengaruh dalam perkembangan perburuhan di kota tersebut. SI didirikan tidak semata-mata untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang Cina, tetapi untuk mengadakan front melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumiputra. Hal ini juga merupakan reaksi terhadap rencana politik pengkristenan oleh kaum *zending*, perlawanan terhadap kecurangan-kecurangan dan penindasan-penindasan dari pihak penguasa bumiputra. Oleh karena itu SI berhasil sampai pada lapisan bawah masyarakat, yaitu lapisan yang sudah berabad-abad hampir tidak mengalami perubahan dan paling banyak menderita.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Agustinus Supriyono, *Buruh Pelabuhan Semarang: Pemogokan-Pemogokan Pada Zaman Kolonial Belanda, Revolusi dan Republik 1900-1965*, (Yogyakarta, 2007), hlm. 7.

<sup>4</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho

Ditinjau dari anggaran dasarnya dapat dilihat bahwa SI bertujuan mengembangkan jiwa berdagang, mereka memberikan bantuan kepada para anggotanya yang mengalami kesulitan, memajukan pengajaran dan semua yang memperepat naiknya derajat bumiputra, menentang pendapat-pendapat keliru tentang Islam, dari hal itu bisa dilihat SI tidak berisikan politik. Namun dari seluruh aksi perkumpulannya dapat dilihat bahwa SI melaksanakan suatu tujuan ketatanegaraan. SI selalu memperjuangkan dengan gigih mengenai keadilan dan kebenaran terhadap penindasan serta keburukan lainnya dari pemerintah, aksi-aksinya disertai oleh para wartawan Indonesia yang berani tanpa diragukan. SI di canangkan untuk membangun revolusioner yang tindakannya selalu berani dalam melawan penjajah.<sup>5</sup>

Pada masa kepemimpinan Semaoen para pendukung SI berasal dari kalangan buruh dan rakyat kecil.

---

Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 187-188.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Anggota yang awalnya berasal dari kalangan kaum menengah menjadi gerakan kaum buruh dan tani<sup>6</sup>, dengan adanya perubahan anggota itu, SI Semarang menjadi organisasi yang memiliki anggota yang cukup besar. Dalam jangka waktu setahun dari 1916-1917 jumlah anggotanya meningkat, dari 1.700 menjadi 20.000 orang. Semaoen bersama dengan temannya Darsono dan Alimin Prawirodirjo, telah mulai memberikan pengaruh paham komunis di kalangan SI. Semaoen juga aktif bergerak dalam sarakat buruh kereta api, yaitu di VSTP (*Vereeniging van Spoor en Tramwegpersoneel*) yang didirikan pada tahun 1908 di Semarang yang terbuka bagi pegawai Indonesia maupun Belanda dari semua perusahaan kereta api. SI Semarang di bawah kepemimpinan Semaoen makin radikal dengan mengadakan aksi bersama para buruh. Pada bulan Desember 1917, SI Semarang mengorganisir kaum buruh supaya lebih militan dan mengadakan

---

<sup>6</sup> Soe Hok Gie, *Dibawah Lentera Merah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), hlm. 6-7.

pemogokan terhadap perusahaan yang sewenang-wenang.<sup>7</sup>

Adanya pengaruh Semaoen yang sangat mengapresiasi kaum buruh membuat gerakan buruh yang ada di Semarang semakin terorganisir dengan baik dan sejalan dengan semakin maraknya pergerakan kaum politik di Semarang. Pada tahun 1919 telah didirikan serikat buruh pelabuhan dengan nama *Havenarbeidersbond* (HAB) yang tergabung dalam federasi beraliran komunis yaitu *Revolutionaire Vackcentrale*. HAB berada di bawah kepemimpinan Semaoen, dengan cepat serikat ini membentuk cabang-cabangnya di hampir diseluruh pelabuhan-pelabuhan utama pantai utara Jawa, kecuali Surabaya karena tidak ada yang bersedia untuk memimpin serikat tersebut.<sup>8</sup>

Setelah Indonesia merdeka, membuat para buruh menginginkan serikat-serikat buruh yang mereka

---

<sup>7</sup> Shela Rahmawati, Shela Rahmawati, "Peran Tan Malaka Di Dalam Sekolah Sarekat Islam Di Semarang Tahun 1921-1924", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), hlm. 33-34.

<sup>8</sup> Agustinus Supriyono, *op. cit.*, hlm. 111.

naungi menjadi bagian dari revolusi, untuk mencapai tujuan itu mereka menyelenggarakan perundingan pada tanggal 19 September 1945 di Jakarta untuk mendiskusikan mengenai peranan kaum buruh dalam perjuangan pendirian republik dan bagi peletakan dasar-dasar dari gerakan buruh sesuai dengan tuntutan zaman. Hasil dari perundingan itu, mereka bersepakat untuk mendirikan organisasi buruh yang akan bersatu secara nasional dan mewakili keberadaan serikat buruh dan organisasi buruh lainnya. Organisasi yang berhasil didirikan diberi nama Barisan Buruh Indonesia (BBI)<sup>9</sup>.

Pada masa kolonial Belanda serikat buruh yang berada di luar struktur kekuasaan selalu dianggap sebagai bagian dari gerakan

---

<sup>9</sup> BBI sebagai pelopor untuk menggerakkan dan mengarahkan kaum buruh, dan mengambil bagian perjuangan kemerdekaan, perjuangan buruh tidak dilakukan untuk diri sendiri akan tetapi untuk mempertahankan kemerdekaan dan merebut kekuasaan perusahaan-perusahaan dari tangan musuh dan diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Lihat di Trimurti S. K, *Hubungan Pergerakan Buruh di Indonesia Dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional*, (Jakarta: Idayu, 1975), hlm. 15.

revolusioner penduduk pribumi dan sebagai musuh pemerintah. Pada zaman penjajahan Jepang, berbagai serikat buruh yang sudah ada sejak masa sebelumnya dianggap tidak berguna bagi pencapaian tujuan pemerintah penduduk Jepang yang militeristik. Sebaliknya pada masa revolusi gerakan buruh dan serikat buruh merupakan bagian dari gerakan perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, disamping itu para pemuda yang bekerja diberbagai jawatan ikut berjuang melawan Belanda dengan mendirikan badan-badan perlawanan antara lain Angkatan Muda Kereta Api (AMK), Angkatan Muda Gas dan Listrik (AMGL), Angkatan Muda Pos Telepeon dan Telegram (AMPTT), Angkatan Muda Guru (AMG) dan lain-lain.<sup>10</sup>

Pada tahun 1948 serikat-serikat buruh diberbagai pelabuhan itu menyatukan diri secara nasional dengan membentuk Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP). Sesudah itu serikat-serikat buruh yang

---

<sup>10</sup> Agustinus Supriyono, *op.cit*, hlm. 211.

baru bermunculan, antara lain Perserikatan Pegawai Negeri Bangsa Indonesia, perkumpulan para buruh percetakan dan penerbitan koran-koran yang bersatu dengan menggunakan nama Serikat Boeroeh Tjetak (SBT), serikat para tukang potong rambut dan tukang jagal (pekerja pemotong hewan), serikat para penjahit, serta para pengemudi becak turut mendirikan perkumpulan Becakbond. Momen dari proklamasi 17 Agustus 1945 dan adanya demam revolusi menimbulkan tekad para buruh atau pekerja untuk mendirikan serikat-serikat atau perkumpulan-perkumpulan, yang selama pendudukan Jepang sangat dibatasi bahkan tidak diperbolehkan.<sup>11</sup>

Setelah maraknya pembentukan partai politik pada masa itu memberikan pengaruh pada gerakan buruh di berbagai tempat, begitu juga di Semarang. Pada tahun 1947 di pelabuhan Semarang terbentuklah Gabungan Buruh Pelabuhan (GBP). Sesuai dengan namanya, para anggota serikat ini terdiri dari para buruh yang

bekerja di dermaga atau gudang-gudang di pelabuhan dan yang bekerja pada angkutan bandar dan kapal-kapal. GBP bersifat netral, dalam arti tidak terikat dengan organisasi politik mana pun. Baru selanjutnya pada tahun 1948 terbentuk lagi sebuah serikat buruh bernama Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP). Berbeda dengan GBP, serikat ini berada di bawah pengaruh kendali SOBSI, yang berarti juga berada dalam kendali PKI.<sup>12</sup>

### **C. Persaingan Organisasi Buruh Pelabuhan di Semarang**

Walaupun Belanda sudah harus menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia, pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949 dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di kota Den Haag negara Belanda, terdapat ketentuan bahwa orang-orang Belanda masih tetap diperbolehkan melanjutkan usaha mereka di Indonesia dan lebih dari itu bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban menyelamatkan

---

<sup>11</sup> Agustinus Supriyono, *op.cit.*, hlm. 213.

---

<sup>12</sup> Menteri Perburuhan, *Serikat-Serikat Buruh Yang Terdaftar*, 1956.

kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda dibekas tanah jajahannya.<sup>13</sup>

Adanya ketentuan tersebut, membuat pihak Indonesia berusaha untuk menyelamatkan aset-aset Belanda yang ada di Indonesia dengan usaha menasionalisasi secara sepihak, termasuk juga menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Pelabuhan Semarang seperti perusahaan angkutan bandar SSPV, perusahaan bongkar muat Semarang Veem dan sebagainya, namun perusahaan-perusahaan itu masih bisa sepenuhnya dipegang oleh para pemilik lama yaitu orang-orang Belanda. Perlu diketahui juga terdapat 3 perusahaan pelayaran dan perdagangan ekspor-impor yang mulai beroperasi lagi di pelabuhan Semarang. Ketiga perusahaan tersebut adalah NV KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) bergerak dalam bidang pelayaran, Nationale Handelsbank (NHB) dan NV Maclaine Watson & Co (MWC) yang bergerak dalam bidang ekspor-impor.

---

<sup>13</sup> The Kian Wie, "Foreign Direct Investment in Indonesia since Independence", (dalam Jurnal *Ekonomi Pembangunan*, Vol. 4, 1996), hlm. 1-26.

Ketiga perusahaan itu mengelola aktivitas bongkar-muat dari kapal-kapal yang merapat di pelabuhan ke dermaga dan sebaliknya. Satu-satunya perusahaan bongkar muat milik orang pribumi yang mulai beroperasi sejak tahun 1951 adalah Perkavi Veem, perusahaan ini milik Ritonga yang sekaligus juga pemimpin dalam aksi-aksi buruh pelabuhan Semarang, yang tergabung dalam GBP.<sup>14</sup>

Pada tahun 1951 pengurus besar SBPP mengadakan perundingan dengan para majikan untuk membicarakan mengenai tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh para buruh diberbagai pelabuhan mengenai upah. Adanya perjanjian KMB yang memberi perlindungan kepada modal asing untuk tetap berkuasa di Indonesia, memberikan rasa persatuan dan mengajak siapapun untuk melawan penindasan tersebut terutama di lingkungan pelabuhan. SBPP juga mengajak seluruh Serikat Buruh untuk berjuang bersama dalam mempertahankan kepentingan para

---

<sup>14</sup> Agustinus Supriyono, *op. cit.*, hlm. 245.

kaum buruh dalam memperjuangkan tuntutanannya.<sup>15</sup>

Seperti yang sudah diketahui SBPP dikendalikan oleh SOBSI yang beraliran PKI, mengenai perkembangan SBPP cukup dikatakan bahwa propagandanya makin lama semakin membawa serikat buruh ini ke dalam arah politik, yang mengandung penghasutan kalangan buruh terhadap majikan-majikan dan pemerintah. Dari banyaknya aksi-aksi pemogokan di berbagai pelabuhan banyak diorganisir oleh SBPP, hal itu menunjukkan pimpinan serikat buruh ini mengambil peran penting dalam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di pelabuhan, dalam setiap pertemuan-pertemuan SBPP selalu dapat dipastikan di dalamnya terdapat anggota-anggota dari PKI.<sup>16</sup> Dapat diketahui jumlah anggota SBPP berjumlah sekitar 3000-6000 buruh.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> ANRI, Sekretariat Negara

Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959. No.3035, hlm. 2.

<sup>16</sup> ANRI, Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959 Jilid II. No. 1741, hlm. 4.

<sup>17</sup> "Demonstrasi Buruh Pelabuhan Semarang", *Suara Merdeka*, 7 April

Gabungan Buruh Pelabuhan (GBP) dipimpin oleh Ritonga, pemimpin dari GBP ini juga merupakan pemilik dari perusahaan Perkavi Veem yang didirikan pada tahun 1951. GBP berbeda dengan SBPP yang berada dalam naungan SOBSI yang kental dengan nuansa PKI, namun GBP ini lebih memilih netral dalam memperjuangkan setiap aksi-aksi penuntutannya. Seperti yang diketahui Ritonga adalah bekas pegawai jawatan pabean di Semarang.<sup>18</sup>

Pada tahun 1948 pemimpin GBP diturunkan dari jabatannya sebagai ketua dengan alasan karena Ritonga telah dianggap menyalahgunakan uang organisasi untuk kepentingannya sendiri, tuduhan itu tidak diakui oleh Ritonga dan ia menganggap itu adalah fitnah. Setelah itu ia ditangkap oleh polisi dengan alasan untuk menyelidikan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan

---

1952. Dan "Buruh Pelabuhan Semarang Tetap Mogok", *Kedaulatan Rakyat*, 19 Januari 1951.

<sup>18</sup> "Sdr. Ritonga akan Diadili", *Suara Merdeka*, 22 Maret 1951.

perbuatannya. Kejadian yang menimpa Ritonga menimbulkan perbedaan pendapat diantara para buruh mengenai skandal korupsi yang dilakukan oleh Ritonga. Terdapat sekelompok buruh yang percaya dan menginginkan Ritonga turun dari jabatannya, namun ada pihak yang curiga bahwa hal itu merupakan sebuah rekayasa dari pihak ketiga. Bisa dari pemerintah, perusahaan, atau partai politik tertentu yang ingin menyingkirkan kepemimpinan Ritonga, dengan tujuan agar aksi-aksi para buruh dapat dihentikan, atau dengan maksud GBP bisa diarahkan menjadi organisasi massa dari partai politik tertentu. Kecurigaan itu muncul karena banyak para buruh yang menjadi anggota GBP tidak tahu menahu mengenai pemecatan Ritonga, karena mereka tidak diundang dalam suatu rapat mengenai pemecatan Ritonga dari jabatannya sebagai ketua GBP.<sup>19</sup>

Terjadinya perpecahan dalam GBP tidak hanya perbedaan pendapat mengenai Ritonga saja, namun ada lagi perbedaan pandangan dalam hal pengajuan tuntutan. Ternyata

---

<sup>19</sup> Agustinus Supriyono, *op. cit.*, hlm. 223.

perpecahan ini juga sebagai kelanjutan dari permasalahan intern dalam tubuh GBP, karena ketuanya yaitu Ritonga dituduh terlibat dalam skandal keuangan organisasi. Tanpa adanya persetujuan menyeluruh dari para anggota GBP, setelah dibebaskan dari tahanan ternyata Ritonga langsung memimpin kembali GBP. Bagi para buruh yang tidak setuju lagi dengan kepemimpinan Ritonga, mereka memilih keluar dari GBP dan bergabung menjadi anggota SBPP.<sup>20</sup>

Bentuk persaingan antara GBP dan SBPP adalah dalam hal perekrutan para buruh agar mau menjadi anggota serikat masing-masing. Dalam hal ini SBPP memang harus bersaing dengan GBP karena lebih dahulu telah didirikan serta tentu saja memiliki anggota lebih banyak. Status keanggotaan para buruh dalam serikat pada dasarnya bukanlah merupakan kesadaran dari diri mereka sendiri, akan tetapi pada umumnya mereka tertarik pada janji-janji serikat buruh

---

<sup>20</sup> NADH, *Verslag NHM, Angentschap Semarang over het jaar 1948*, MVK.

yang akan memperjuangkan kesejahteraan mereka.<sup>21</sup>

Aksi SBPP dalam perekrutan anggota menggunakan cara menawarkan surat edaran kepada para buruh untuk menjadi anggotanya ketika SBPP sedang merencanakan suatu aksi mogok untuk menuntut tunjangan hari raya lebaran. Tentu saja tawaran itu banyak diterima oleh sebagian besar para buruh sehubungan dengan keuntungan ekonomis yang akan segera mereka dapat dan juga sangat dibutuhkan. Namun demikian pada lain waktu para aktivis GBP juga menyodorkan surat edaran kepada para buruh untuk menjadi anggota GBP dan juga merencanakan aksi mogok dengan tuntutan kenaikan upah atau tuntutan lain yang diperkirakan akan menguntungkan buruh dalam jangka pendek. Dengan demikian seorang buruh bisa masuk menjadi anggota SBPP dan GBP sekaligus, bahkan hal itu bisa terjadi berulang-

ulang karena pada setiap kali merencanakan suatu aksi baik SBPP atau GBP selalu kembali menyodorkan

---

<sup>21</sup> Agustinus Supriyono, *op.cit*, hlm.257.

surat edaran dengan tujuan untuk merekrut anggotanya dan mencari dukungan bagi serikat masing-masing.<sup>22</sup> Dapat diketahui jumlah anggota GBP berjumlah sekitar 6000 buruh.<sup>23</sup>

Telah terjadi pemogokan pada 1 Maret 1950 yang dilakukan oleh para buruh tetap yang bekerja pada SSPV menuntut perbaikan upah dan tunjangan lainnya serta masalah jam kerja lembur. Pada tanggal 15 Januari 1951 para buruh yang tergabung dalam Front Kesatuan Buruh Pelabuhan (FKBP) kembali melakukan aksi mogok dengan mengajukan tuntutan mengenai kenaikan upah, gratifikasi, jaminan pensiun, pengakuan terhadap GBP dan SBPP, serta tunjangan keluarga.

#### **D. Penyelesaian Konflik dan Dampak Persaingan Organisasi Buruh Pelabuhan di Semarang Tahun 1947-1965**

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> "Sdr. Ritonga akan Diadili", *Suara Merdeka*, 22 Maret 1951, hlm.112. Dan. "Buruh Pelabuhan Semarang Tetap Mogok", *Kedaulatan Rakyat*, 19 Januari 1951.

Menurut Undang-undang No. 22 tahun 1957, bila terjadi suatu perselisihan perburuhan antara buruh dan para majikan, maka serikat buruh dan majikan harus mencari penyelesaian perselisihan tersebut secara damai dengan jalan perundingan. Persetujuan yang dicapai dari perundingan tersebut dapat disusun menjadi perjanjian perburuhan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perjanjian perburuhan.<sup>24</sup>

Hasil perundingan dari tuntutan buruh yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 1950, perundingan yang membahas tuntutan para pemogok itu berjalan cukup alot dan baru terjadi kesepakatan dalam bentuk perjanjian pada tanggal 13 April 1950. Isi dari kesepakatannya sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a) Upah
- b) Jam kerja dan lembur
- c) Jaminan sosial

---

<sup>24</sup> Undang-undang No.22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, (Lembaran Negara No.42 Tahun 1957).

<sup>25</sup> NADH, *Nederlands Commissariaat te Semarang (Indonesia) 1950-1957*, MBZ 2.05.67.07, No. 97.

Pada 15 Januari 1951 para buruh kembali melakukan aksi pemogokan dan mengajukan sejumlah tuntutan yang harus dipenuhi oleh majikan. Setelah melalui pembahasan dan perundingan, akhirnya dicapai kesepakatan antara para pengusaha dengan para pemogok, yang meliputi beberapa hal, sebagai berikut.<sup>26</sup>

1. Upah atau gaji bagi buruh bulanan
2. Upah bagi buruh harian dan borongan
3. Gratifikasi
4. Atas permintaan pemerintah kepada kedua belah pihak (majikan dan buruh), juga dihasilkan persetujuan khusus yang berkaitan dengan pemogokan, yaitu:

- Upah selama pemogokan dibayar sebesar 50%, sedangkan hari-hari mogok itu adalah dari tanggal 18-20 Desember 1950, 10-13 Januari 1951 dan 15 Januari.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

- Para buruh harus mulai bekerja kembali pada tanggal 16 Januari 1951.
5. Mengenai tunjangan pensiun hanya akan diberikan kepada para buruh bulanan yang telah dan akan bekerja terus-menerus minimal 20 tahun. Hanya saja pensiun itu bisa diberikan sekaligus pada waktu yang bersangkutan berhenti bekerja secara terhormat dalam bentuk pesangon.

Pada bulan Juni 1951 Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) daerah Semarang yang menjadi penengah dalam konflik perburuhan antara Gabungan Buruh Pelabuhan (GBP) dengan KPM, NHB, MWC dan SSPV. Namun P4 tidak bisa menemukan solusi untuk kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Oleh karenanya permasalahan itu diajukan kepada P4 Pusat di Jakarta. Dalam tahap perundingan antara wakil GBP dengan wakil-wakil dari perusahaan yang ditengahi oleh P4 Pusat ternyata juga tidak menemukan titik tengahnya dari konflik tersebut. Oleh karena itu

sesuai dengan kewenangannya, dan dengan mengacu pada pasal 1 dan 3 Undang-undang Darurat No.16/1951, pada tanggal 17 Maret 1952 P4 Pusat mengeluarkan keputusan sebagai berikut.<sup>27</sup>

1. Upah harian buruh tetap di NWC setelah berdinis 3 tahun harus dinaikan 0,75 per hari jika menurut penilaian pengusaha menunjukkan kinerja yang baik.
2. Menolak tuntutan tunjangan beras kepada setiap anggota keluarga buruh SSPV.
3. Membenarkan pelaksanaan peraturan pada SSPV mengenai jaminan pensiun sesuai dengan yang telah diumumkan oleh SSPV.
4. Mengembalikan perselisihan antara buruh dengan SSPV dan NHB kepada kedua belah pihak untuk diselesaikan melalui perundingan.

Dari keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

---

<sup>27</sup> *Tinjauan Mas'alah Perburuhan*, No. 3/4/5 Tahun IV, Juli, Agustus-September, 1952.

(P4) Pusat tersebut dapat diketahui bahwa pihak buruh yang diwakili GBP harus terpaksa berlapang dada karena semua tuntutan yang diajukan tidak bisa dipenuhi. Khusus mengenai tunjangan beras atau keluarga dan pensiun, sesuai dengan keputusan diatas tetap hanya akan diberikan kepada buruh tetap saja. Ada jaminan keamanan dari penguasa militer untuk berjaga-jaga disebagian wilayah pelabuhan dari ancaman akan adanya aksi mogok lagi, sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan yang dianggap merugikan para buruh. Disamping itu penguasa militer juga menyiapkan tentara untuk menghentikan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal-kapal besar yang berlabuh di laut dan sebaliknya bila sewaktu-waktu terjadi aksi pemogokan.<sup>28</sup>

Adanya aksi-aksi yang telah dilakukan oleh para buruh pelabuhan tentunya memberikan dampak langsung maupun tidak langsung. Yang pertama yaitu adanya pencurian atau penyelundupan di pelabuhan. Pada

---

<sup>28</sup> NADH, *Verslag NHM, Angentschap Semarang over het jaar 1952*, MVK.

tahun 1950 banyak kasus pencurian di pelabuhan meningkat tajam, pada tahun 1952 telah terjadi 278 kasus pencurian di dermaga pelabuhan dan 133 kali pada kapal-kapal besar di tengah laut. Pencurian di kapal-kapal besar biasanya dilakukan oleh para mantan buruh harian tetap yang tidak diterima lagi oleh SSPV, yang bekerjasama dengan para buruh harian lepas yang bekerja di SSPV pada malam hari. Bentuk kerjasama itu dilakukan dengan pembagian hasil dari barang-barang curian yang mereka peroleh. Bisa dilihat bahwa kasus pencurian-pencurian ini sebagai akibat dari kekecewaan para mantan buruh yang tidak diterima lagi di perusahaan SSPV. Pencurian di dermaga dilakukan dengan modus buruh pura-pura tidak sengaja memasukkan peti-peti pembungkus barang pada waktu mereka bekerja, dari peti-peti yang rusak itulah mereka mengambil barang-barang. Untuk mengeluarkan barang-barang biasanya mereka harus membayar upeti kepada polisi penjaga pos keluar masuk pelabuhan, atau bekerjasama dengan petugas kereta api yang membawa gerbong-gerbong kereta ke pelabuhan untuk mengantar

atau mengangkut barang-barang dari pelabuhan.<sup>29</sup>

Pemogokan-pemogokan yang dilakukan oleh para buruh tentunya sangat merugikan bagi pihak majikan, karena terhentinya aktifitas bongkar muat yang membuat pemasukan bagi perusahaan berkurang, begitu juga bagi para buruh selain penghasilan mereka berkurang mereka juga terpaksa menjadi pencuri dengan melakukan aksi penjarahan karena pendapatan mereka berkurang yang memaksa keadaan mereka harus melakukan tindakan tersebut. Keadaan tersebut juga berpengaruh bagi keadaan perekonomian kota Semarang dan Jawa Tengah yang juga merasakan dampaknya, keadaan pelabuhan yang tidak stabil membuat perekonomian menjadi terganggu karena proses perdagangan juga ikut terhambat.

Secara politis peraturan pemerintah No. 61/1954 juga mengandung ketentuan yang mengharuskan tindakan nasionalisasi dalam bidang usaha bongkar muat dan pelayaran, karena usaha dalam bidang

Perusahaan Muatan Kapal Laut (PMKL) hanya boleh dilakukan oleh perusahaan nasional Indonesia. Ketentuan itu juga berlaku bagi perusahaan-perusahaan Belanda seperti KPM, *Stoomvaart Maatschappij Nederland* (SMN), serta perusahaan-perusahaan asing Belanda lainnya dibidang bongkar muat dan pelayaran. Terkecuali bagi perusahaan-perusahaan *Bataafsche Petroleum Maatschappij*, Stanvac dan Caltex, yang diberi izin istimewa sementara untuk tetap diperbolehkan memiliki *veem* di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Dalam hubungannya dengan aksi-aksi pemogokan di pelabuhan Semarang khususnya yang selalu menimpa perusahaan SSPV, maka PP No. 61/1954 itu tentu saja membuat manajemen perusahaan SSPV menjadi kurang berkepentingan untuk menyelesaikan konflik perburuhan tersebut, apa lagi dengan jalan menambah armada tokangnya.<sup>30</sup> Aksi nasionalisasi terhadap perusahaan-

---

<sup>29</sup> Agustinus Supriyono, *op. cit.*, hlm. 269-270.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 273.

perusahaan asing mulai terlihat pada Mei 1959.<sup>31</sup>

Pada tahun 1956 pemerintah mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan milik negara atau warga negara asing, yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 mengenai nasionalisasi. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan milik asing berubah statusnya menjadi milik negara Indonesia.<sup>32</sup> Dengan dana subsidi dari pemerintah, PN Djakarta Lloyd yang sejak tahun 1956 disertai untuk mengambil alih manajemen SSPV.<sup>33</sup> Nasionalisasi akhirnya terjadi pada tanggal 5 Desember 1960.<sup>34</sup>

Adanya keterkaitan organisasi buruh dengan politik komunis (PKI), membuat kejayaan organisasi buruh di pelabuhan Semarang mengalami kehancuran. Sementara itu untuk menjaga kelangsungan kegiatan perekonomian di Semarang dan

---

<sup>31</sup> NADH, *Verslag NHM, Agentschap Semarang over het jaar 1956*, MVK.

<sup>32</sup> Djumadi, *op. cit.*, hlm. 25.

<sup>33</sup> Agustinus Supriyono, *op.cit.*, hlm. 277.

<sup>34</sup> NADH, *op. cit.*,

khususnya kegiatan bongkar muat di pelabuhan Semarang, maka pemerintah mengeluarkan SK Dirjen Perhubungan Laut No. Kab/4/9/18 tanggal 17 Juli 1964 dan didukung dengan SK Bersama Menteri Perhubungan. Hasil dari keputusan tersebut secara resmi Pool Buruh dibentuk, sehingga dalam kurun waktu saat itu, organisasi buruh mulai dibina oleh Pool Buruh sehingga setelah peristiwa G30S/PKI, organisasi buruh seperti organisasi yang kehilangan induknya.<sup>35</sup>

Adanya peristiwa pemberantasan PKI membuat banyak organisasi-organisasi buruh mengalami perubahan karena sebagian besar organisasi yang ada mempunyai kedekatan dengan PKI contohnya seperti SBPP dan SOBSI. Di Semarang peristiwa G30S/PKI mempunyai arti yang mendalam, khususnya bagi organisasi-organisasi buruh di pelabuhan Semarang, peristiwa G30S/PKI dan sesudah peristiwa itu menjadikan organisasi-organisasi mengalami trauma dan

---

<sup>35</sup> Kursin, "Organisasi Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dalam Upaya Penyelesaian Konflik Perburuhan Tahun 1965-2000", *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm. 5-6.

untuk sementara waktu menjadi vakum serta menjauh dari organisasi-organisasi politik. Oleh karena itu keberadaan buruh pelabuhan di tahun 1965 mengalami keterpurukan. Sementara itu dalam kurun waktu 1965-1970 masa SBPP berakhir, kemudian keberadaan buruh pelabuhan Semarang bergabung dalam unit-unit kerja di pelabuhan seperti Pool Buruh (1964-1969).<sup>36</sup>

#### **E. Kesimpulan**

Buruh pelabuhan yang ada di Semarang mempunyai peran penting bagi perekonomian di kota Semarang dan provinsi Jawa Tengah. Pada masa revolusi buruh menjadi bagian dari perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Buruh-buruh pelabuhan yang ada di pelabuhan Semarang terbagi menjadi dua yang tergabung dalam Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) serta Gabungan Buruh Pelabuhan (GBP), buruh yang tergabung dalam SBPP dan GBP tentunya mempunyai tujuan masing-masing dalam tiap aksi gerakannya,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

SBPP yang dinaungi oleh SOBSI tentunya mempunyai tujuan lain selain memperjuangkan perbaikan nasib dari para buruh yaitu menyebarkan pengaruh komunisnya. Propaganda SBPP semakin lama membawa serikat buruhnya ke dalam ranah politik yang mengandung penghasutan kalangan buruh terhadap para majikannya dan terhadap pemerintah. Tujuan GBP selain untuk perbaikan nasib para buruh namun ada tujuan lain dari aksi-aksi yang dipimpin oleh Ritonga yaitu mencari keuntungan ekonomis untuk perusahaannya sendiri. Secara organisasi GBP memang bersifat netral dari pengaruh organisasi politik, namun keberadaan para buruh ternyata lebih menjadi suatu alat untuk menguntungkan perusahaannya.

Dampak dari adanya pemogokan yang dilakukan oleh para buruh adalah banyaknya aksi pencurian dan penyelundupan barang-barang yang dibawa oleh kapal-kapal besar yang menepi di pelabuhan Semarang. Aksi penyelundupan dan pencurian dilakukan oleh para mantan buruh tetap yang tidak diterima lagi di perusahaan SSPV. Pencurian dilakukan pada

malam hari, para buruh bekerjasama dengan para buruh harian lepas yang bekerja pada jam malam, bentuk kerjasama dalam pencurian barang ini dilakukan pembagian hasil dari barang-barang curian yang mereka peroleh. Selain penyelundupan dampak lain dari seringnya aksi pemogokan kerja yang dilakukan oleh para buruh adalah pengurangan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Semarang serta dirubahnya rute bongkar muat ke pelabuhan Surabaya. Hal ini mengakibatkan aktivitas perdagangan ekspor impor melalui pelabuhan Semarang menurun drastis. Bahkan terganggunya aktivitas di pelabuhan Semarang yang semakin berlarut-larut sudah mengganggu perekonomian Jawa Tengah dan kota Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip:

ANRI, Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959. No.3035.

ANRI, Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959 Jilid II. No. 1741.

NADH, *Nederlands Commissariaat te Semarang (Indonesia) 1950-1957*, MBZ 2.05.67.07, No. 97.

NADH, *Verslag NHM, Angentschap Semarang over het jaar 1948*, MVK.

NADH, *Verslag NHM, Angentschap Semarang over het jaar 1952*, MVK.

NADH, *verslag NHM, angentschap Semarang over het jaar 1956*, MVK.

### Buku dan Artikel:

Agustinus Supriyono, *Buruh Pelabuhan Semarang: Pemogokan-Pemogokan Pada Zaman Kolonial Belanda, Revolusi dan Republik 1900-1965*, (Yogyakarta, 2007), hlm. 7.

Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.

Menteri Perburuhan, *Serikat-Serikat Buruh Yang Terdaftar*, 1956.

Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.

Soe Hok Gie, *Dibawah Lentera Merah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999.

The Kian Wie, "Foreign Direct Investment in Indonesia since Independence", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 4, 1996.

Trimurti S. K, *Hubungan Pergerakan Buruh di Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional*, Jakarta: Idayu, 1975.

Undang-undang No.22 Tahun 1957, Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Lembaran Negara No.42 Tahun 1957.

**Skripsi:**

Kursin, "Organisasi Buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Perburuhan Tahun 1965-2000", *Skripsi*, Semarang: UNES, 2013.

Shela Rahmawati, "Peran Tan Malaka Di Dalam Sekolah Sarekat Islam Di Semarang Tahun 1921-1924", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

**Surat Kabar dan Majalah:**

*Kedaulatan Rakyat*, 19 Januari 1951.

*Suara Merdeka*, 22 Maret 1951.

*Suara Merdeka*, 7 Arpil 1952.

*Tinjauan Mas'alah perburuhan*, No. 3/4/5 Tahun IV, Juli, Agustus-September, 1952.